



PUTUSAN

Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Saniangbaka, 14 juni 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Luthy Yustika, S.H, M.H**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di R Yustika & Partners Advocate and Legal Consultant, Jl. Kavling Pemda IV No. 165, RT 004 RW 005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 978/KUASA/IX/2022, tanggal 01 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Saniangbaka, 02 Februari 1976, agama Islam, tempat kediaman dahulu beralamat di JAKARTA BARAT sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan secara sah. Pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2003 telah melangsungkan pemikahan menurut tata cara Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Hal itu sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/1/2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul). Dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK I, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2007;

### **Alasan-Alasan Gugatan Cerai Penggugat Karena Adanya Pertengkaran Atau Perselisihan Yang Terus Menerus Antara Penggugat Dengan Tergugat;**

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus-menerus dan berujung pertengkaran sehingga membuat Penggugat kehilangan kebahagiaan sebagai isteri Tergugat. Sudah berkali-kali Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, bahkan orang tua Penggugat pun sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi selalu

*Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng*



gagal. Bahkan perselisihan di antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa lagi didamaikan;

4. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis dan bahkan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, antara lain karena :
  - a. Tergugat mempunyai sifat emosidan temperamen kepada Penggugat, seperti ketika sedang marah Tergugat lebih sering menyalahkan Penggugat, terutama dalam hal anak. Hal itu sering terjadi tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat jika sedang marah sering merusak perabotan rumah tangga, membuat Penggugat sering ketakutan. Hal itu membuat Penggugat merasa tertekan dari awal berumah tangga dengan Tergugat;
  - c. Tergugat kerap kali mengucapkan kata-kata kasar seperti kata binatang dan hinaan lainnya kepada Penggugat. Membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri Tergugat;
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata talaq kepada Penggugat.
  - e. Tergugat pernah melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikhis kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I) sehingga anak pernah keluar dari rumah akibat kekerasan tersebut. Hal itu menimbulkan rasa sedih, takut dan kecewa yang mendalam di hati Penggugat, sehingga Penggugat kini merasa Trauma jika harus bersatu lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga;
  - f. Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan dan ekonomi keluarga, sehingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan sejumlah hutang kepada pihak ketiga dan harus dibayar oleh Penggugat;
  - g. Tergugat pernah mengakui kepada Penggugat bahwa pernah ada Wanita Idaman Lain (WIL) hadir di hati Tergugat. Hal itu membuat Penggugat semakin merasa sedih dan kecewa kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi sekitar tanggal 24 Juli 2022. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, sampai

*Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng*



dengan surat gugatan ini dilayangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi berada dimana, baik di dalam atau di luar Indonesia. Hal itu sudah dibuktikan dengan Penggugat bertanya kepada adik dan keluarga Tergugat. Akan tetapi mereka menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ini baik di dalam atau di luar Indonesia;

6. Berdasarkan uraian kronologis di atas maka Tergugat dengan Penggugat pada pokoknya sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun. Senyata-nyatanya kondisi perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sehat lagi, bahkan jauh dari kata harmonis. Penggugat sudah lelah menderita lahir dan batin selama hidup berumah tangga dengan Tergugat. Kini Penggugat bertekad kuat untuk mengadakan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat kepada Hakim di Pengadilan Agama Tangerang agar memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyerahkan tentang beban biaya perkara menurut hukum;

#### **Dasar Hukum Gugatan Cerai Penggugat**

Bahwa Penggugat melayangkan gugatan a quo berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S : An-Nisa : Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.
2. Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 76 ayat (1) UU. No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alasan perceraian karena syiqaq diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri;

*Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng*



4. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin (f), yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, yang mengatur bahwa: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
6. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satunya yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Pasal 20 f Peraturan Pemerintahan (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
8. Pasal 20 f Peraturan Pemerintahan (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
9. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan;
10. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
11. Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng pertama tanggal 02 September 2022 dan kedua tanggal 03 Oktober 2022, yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Sta-Radio 107.3 FM Tangerang) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 978/KUASA/IX/2022, tanggal 01 September 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng*



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**1. Bukti surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 19/RT.004-01/PNG/22, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 004 RW.001, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 982/1.755.00/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta barat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi:**

- 2.1 SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Balai Mansiang Balai Gadang, Desa Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak,



Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Pinang Kunci RT 004 RW 001 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 24 Juli 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jika sedang marah sering merusak perabotan rumah tangga, membuat Penggugat sering ketakutan. Tergugat sering berkata kasar, dan

*Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng*



mengucapkan thalak kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama kurang lebih tiga bulan, dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mencari kembali Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk mencari pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

2.2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kembangan Utara RT.08 RW 02 Nomor 139, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alamat di Jalan Pinang Kunciran RT 004 RW 001 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng



- Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 24 Juli 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jika sedang marah sering merusak perabotan rumah tangga, masalah nafkah, dan Tergugat mempunyai wanita Idaman Lain, dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama kurang lebih tiga bulan, dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mencari kembali Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk mencari pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

*Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng*



dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tangerang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka, Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib), yang merupakan fotokopi akta autentik dan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang



berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 24 Juli 2022, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan



(*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jika sedang marah sering merusak perabotan rumah tangga, membuat Penggugat sering ketakutan. Tergugat sering berkata kasar, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan thalak kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 24 Juli 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada 24 Juli 2022, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng



keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفْسادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفریق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo*. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT** kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syarif Hidayatullah, M.H. dan Drs. H. Mawarlis,

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2022/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.Syarif Hidayatullah, M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mawarlis, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).